

GERAKAN POLITIK PEREMPUAN PARTAI GOLKAR
KOTA PEKANBARU PERIODE 2004 – 2009
DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN
Wan Asrida, Wazni dan Chitra Puspita Dewi

Abstrak :

Woman political participation on reform era is normal activity. Reform produced rules (Act about General Election and Act about Political Party) which give space for woman political participation. Golongan Karya Party is one of strong political party in Indonesia that have commitment for woman empowerment in politic which women cadres have position as management of party and legislative in Pekanbaru. There are problem that how woman can use opportunity as management party and legislative to fighting for woman interests by political movements. These political movements have well-constructed activities (appropriate for woman interest), with woman's collective as an institution, sense of solidarity, woman collective identity and continuity activities by systematic in Golongan Karya Party.

Keywords: Woman and Politic, Women Movement, Golongan Karya Party

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik pada era reformasi dipandang sebagai hal yang lumrah. Reformasi telah menghasilkan ketentuan-ketentuan (UU pemilu dan UU partai politik) yang memberi ruang bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia publik. Partai golkar adalah salah satu partai politik yang telah teruji dalam panggung perpolitikan di Indonesia, yang juga memiliki komitmen untuk memberdayakan perempuan dalam politik, dengan menempatkan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan wakilnya di DPRD Kota Pekanbaru. Persoalannya adalah bagaimana perempuan dapat memanfaatkan peluang tersebut melalui kepengurusan partai politik (anggota legislatif) memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan, dalam bentuk gerakan-gerakan(politik) yang agendanya tersusun secara jelas apa yang diinginkan oleh perempuan, dengan kolektifitas perempuan secara terlembaga, dengan rasa solidaritas dan identitas kolektifitas yang dimiliki perempuan, serta adanya kontinuitas agenda/kegiatan yang dilakukan oleh perempuan secara sistematis dalam partai golkar.

Kata kunci : Perempuan dan politik, gerakan wanita, partai golongan karya

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Studi tentang keterlibatan perempuan dalam politik sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk penelitian, pengabdian, seminar-seminar (lokal, nasional, internasional), diskusi ilmiah, debat, maupun artikel dalam media massa (cetak/audio visual). Hampir semua kajian tersebut membahas kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (keterwakilan politik perempuan). Tuntutan keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam politik, umumnya didasari oleh argumen bahwa : *Pertama*, untuk memperjuangkan kepentingan perempuan mempengaruhi kebijakan pemerintah maka harus dimulai dengan duduknya perempuan dalam jabatan politik. *Dua*, kewajaran keterwakilan perempuan dalam jabatan politik (legislatif dan partai politik) didasari oleh jumlah perempuan yang lebih besar dari jumlah laki-laki. Data jumlah perempuan di Indonesia sebesar 101.625.816 jiwa (sensus tahun 2002) atau sekitar 51% dari seluruh jumlah penduduk. Mayoritas dari segi jumlah tetapi minoritas secara politis.

Era reformasi ditandai dengan diamandemennya UUD 1945, dimana Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan yang sama bagi setiap orang untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya sendiri, seperti yang terdapat pada pasal 17 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pasal 28 UUD 1945 juga mencantumkan bahwa : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang Undang. Mengacu pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 UUD 1945 maka jelas sudah ada jaminan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk perempuan. Keberadaan undang-undang tentang pemilu dan partai politik sudah memberi peluang dan kesempatan yang besar bagi perempuan untuk berpartisipasi politik, dengan memberikan quota 30% bagi perempuan.

Pada pemilu 2004 data menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik di Kota Pekanbaru sudah menempatkan kaum perempuan di jajaran calon legislatif untuk mewakili partai masing-masing. Tercatat 24 partai politik yang ikut bersaing pada pemilu 2004, terdapat 12 partai politik yang memenuhi quota 30% perempuan. Data juga menunjukkan bahwa dari 12 partai politik yang memenuhi quota 30% tersebut, hanya terdapat 3 partai besar, yakni : Partai Demokrat (40%), Partai Keadilan Sejahtera (38%), dan PDIP (40%). Sementara Partai Golkar hanya menempatkan perempuan sebesar 28% (Data KPU Pekanbaru, 2004), yakni 15 perempuan dari jumlah keseluruhan (53 orang). Setelah melalui proses pemilihan maka pemilu 2004 menghasilkan satu orang perempuan dari 12 calon terpilih untuk duduk di legislatif, yaitu : Hj. Akmal Dt. Adham (belum tercipta penguatan posisi perempuan)

Fokus penelitian ini dilakukan pada Partai Golkar mengingat partai golkar merupakan salah satu partai besar, yang sudah teruji dalam panggung perpolitikan di Indonesia, khususnya pada masa orde baru. Setelah runtuhnya rezim orde baru, dan memasuki era reformasi maka salah satu tuntutan reformasi adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih besar menuju pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut membuat semakin terbuka ruang politik bagi perempuan untuk ikut serta berpartisipasi politik. Era reformasi selain dilakukannya amandemen atau reformasi pada UUD 1945 tetapi juga pada undang-undang partai politik (reformasi sistem kepartaian). Ditandai dengan iklim politik yang lebih kondusif, terbuka, munculnya partai-partai baru yang mencerminkan keinginan bagi perwujudan partisipasi politik masyarakat yang lebih luas, termasuk perempuan. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan keterlibatan perempuan dalam partai politik maupun dalam jabatan politik. Namun perkembangan dari keberadaan perempuan yang ikut berpartisipasi dalam aktivitas politik belum menunjukkan suatu gerakan politik yang bermakna dengan agenda yang jelas mengenai apa yang harus dan ingin dilakukan oleh perempuan, kollektivitas yang belum terlembaga, rasa solidaritas diantara perempuan yang belum terbangun kuat, dan kurangnya keberlanjutan atau kontinuitas dari apa yang harus dilakukan oleh perempuan di Partai Golkar Kota Pekanbaru periode 2004-2009. Apakah keberadaan dan keterlibatan perempuan bidang politik masih dalam rangka penguatan/memperkuat legitimasi partai Golkar, elite partai yang duduk di pemerintah? Kajian tentang hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui komposisi dan posisi perempuan dalam Partai Golkar periode 2004 - 2009
- b. Untuk mendeskripsikan gerakan perempuan dalam Partai Golkar di Kota Pekanbaru periode 2004-2009.

3. Kerangka Teori

Demokrasi adalah suatu sistem politik, yang di dalamnya para warga secara bersama-sama dapat menyalurkan aspirasinya lewat wakil-wakil yang telah dipilihnya. Demokrasi harus menjadi alat picu bagi proses pendewasaan bangsa dan persamaan hak, dan harus menjadi landasan politik sebagai perwujudan dari kehendak rakyat. Dalam arti yang sebenarnya perlu dirumuskan suatu konsep, strategi dan pedoman dasar yang dapat mengakomodasikan aspirasi rakyat di satu pihak dan garis kebijakan politik pemerintah di pihak yang lain. Bagi Robert A. Dahl, demokrasi adalah suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama di pandang dari segi politik, dan mereka secara bersama-sama berdaulat dan memiliki segala kemampuan, sumber daya dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri (A. Rahman Zainuddin: 1992).

Inti dari demokrasi adalah partisipasi, jadi partisipasi dari rakyat merupakan suatu keharusan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kadar demokrasi yang ada di negara tersebut. Salah satu persyaratan yang dibutuhkan dalam setiap proses demokrasi adalah persamaan kedudukan warga negara. Setiap warga negara harus dijamin haknya untuk memiliki persamaan politik, persamaan di muka umum, persamaan kesempatan, persamaan dalam bidang ekonomi dan sosial, di bidang politik, persamaan tersebut berarti adanya hak yang sama untuk dipilih maupun memilih, menentukan pilihan sesuai dengan keinginan dan perlakuan yang sama terhadap suara dalam pemilihan.

Menurut Robert Dahl (dalam Affan Gafar: 2000), pemerintah hendaknya tanggap terhadap kehendak rakyat, atau dapat berperilaku secara demokratis. Untuk dapat menjamin hal tersebut maka rakyat harus diberikan kesempatan :

1. Merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri
2. Memberikan prihal preferensinya atau kepentingannya dimulai melalui tindakan individu/kolektif
3. Mengusahakan agar kepentingannya dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah

Mengenai gerakan politik maka terdapat lima isu besar menandai gelombang perjalanan gerakan perempuan (Ben Agger, dalam Hasanuddin M. Saleh: 2007) terutama di negeri Barat yang kemudian merembet ke negeri-negeri Timur. *Pertama*, perjuangan mendapatkan hak pilih. Persoalannya adalah bukan sekedar mendapatkan hak pilih tapi lebih daripada itu, yaitu kecerdasan dalam mengekspresikan hak pilih. Suara perempuan masih terkooptasi oleh relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam bentuk hubungan *patron client* dimana laki-laki sebagai pola dan perempuan sebagai pengikut. *Kedua*, berusaha mendapatkan hak aborsi, kesamaan upah, dan perlindungan melawan diskriminasi seksual dan pelecehan seksual. Perjuangan ini dilandasi pemikiran bahwa perempuan tidak seharusnya mengganggu beban yang lebih berat (apabila tidak dikehendaki) atas akibat perbuatan bersama. Disamping itu perempuan berhak berada pada posisi setara dalam rumah tangga maupun di dunia kerja.

Ketiga, menyoroti politik seksualitas dan domestikasi baik pada level personal maupun pada level publik dengan melihat keterkaitan hubungan dua wilayah itu. Pandangan tentang pembagian kerja secara seksual yang membantu menjelaskan bagaimana subordinasi perempuan di pasar kerja, politik dan budaya mencerminkan dan memperkuat subordinasi mereka dalam rumah tangga. *Keempat*, mendobrak objektivitas perempuan oleh laki-laki yang disebabkan pembagian kerja berdasarkan seks, bukan hanya melemahkan perempuan secara politis dan ekonomis, namun juga mendegrasikan perempuan secara seksual dan kultural. *Kelima*, kritik atas heteroseksual wajib dipandang sebagai penghambat bagi perempuan untuk memposisikan dirinya sebagai subjek dan menolak posisi sebagai objek. Ini menjelaskan kecenderungan perempuan menjadi lesbian (disamping persoalan orientasi seksual).

Isu-isu tersebut, dalam perspektif teori feminis dikonstruksi ke dalam tiga aliran besar yaitu: *pertama*, feminisme liberal yang berpandangan bahwa perempuan dapat menaikkan posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat melalui kombinasi inisiatif dan prestasi individual, diskusi rasional dengan laki-laki, khususnya suami. Pendekatan kombinasi reformasi dan persuasi termasuk lobi politik menjadi pilihan utama penganut teori feminis liberal. Pilihan ini juga dipakai dalam kondisi ketidakadilan dalam rumah tangga. Pada intinya perlu negosiasi rasional untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam rumah tangga. Feminis liberal percaya bahwa laki-laki dapat dinalar atau diyakinkan untuk memikul beban lebih banyak dalam rumah tangga. Feminis liberal sangat percaya terhadap keluarga heteroseksual yang terdiri dari satu laki-laki dan satu wanita yang berpasangan secara sah.

Kedua, feminisme radikal atau kultural yang melihat bahwa penindasan atas perempuan terutama terjadi karena patriarki yang beroperasi pada level keluarga, dan atas harapan atas heteroseksual wajib dan pada level budaya dimana citra seksis perempuan diobjektifkan sehingga menindas mereka. Feminis radikal berpandangan bahwa feminis perlu meruntuhkan atau secara

radikal memperbaiki keluarga dan menciptakan budaya non-misoginis dimana perempuan tidak dijadikan PR. Feminis radikal cenderung lebih banyak perhatian pada ketimpangan ekonomis antara laki-laki dan perempuan. Feminis radikal menyalahkan dilemma perempuan dalam patriarki yang diyakini berasal dari keluarga dan cara dimana perempuan terjebak dalam peran tanggung jawab dan kewajiban mereka. Agaknya feminisme radikal merupakan paham esensialisme yang eksplisit dan tertutup yang berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya berbeda dalam hal cara mereka memahami, berbeda dalam topik pembicaraan yang diperbincangkan dan cara mereka bertindak di atas dunia.

Ketiga, feminisme sosialis yang berpendapat bahwa perempuan tidak dapat meraih keadilan sosial tanpa membubarkan patriarki dan kapitalisme. Menurut mereka kapitalisme menciptakan keuntungan bukan hanya diatas punggung pekerja laki-laki upahan, namun juga diatas punggung anak dan isteri mereka yang melakukan semua tugas rumah tangga yang tidak mengenakan tanpa mendapat imbalan selain upah keluarga yang penuh dengan mitos. Kapitalisme telah menempatkan perempuan ke dalam kelas tertindas yang dieksploitasi oleh laki-laki. Dua aspek pemosisian perempuan yang mempengaruhi satu sama lain, yaitu jam kerja yang dihabiskan perempuan di sektor domestik secara langsung mengurangi kekuatan mereka dalam mendapatkan penghasilan dan akan menghabiskan banyak waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk aktivitas kerja upahan. Isu yang terlontar dalam gelombang gerakan perempuan dengan berbagai variasi teoritisnya tersebut harus dipilah-pilah secara cerdas. Dalam kenyataan, apa yang diyakini sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan, tidak serta merta membawa kondisi positif bagi perempuan dan bahkan telah memporak-porandakan tatanan nilai dalam keluarga dan masyarakat.

Gerakan politik perempuan mestilah dibangun atas dasar tatanan nilai yang kokoh supaya tidak terjebak hanya menjadi gerakan reaktif. Minimal gerakan politik perempuan harus didudukkan dalam kerangka gerakan reformatif. Untuk sampai kepada tahapan itu, sebuah gerakan harus memiliki: *Pertama*, agenda yang jelas mengenai apa yang diinginkan perempuan untuk dirubah dalam tatanan kehidupan bernegara. Agenda atau paket politik yang ingin diperjuangkan dalam gerakan perempuan haruslah diturunkan dari tujuan yang telah dirumuskan secara matang. *Kedua*, kolektivitas yang akan lebih bagus kalau terlembaga; *ketiga*, rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan *Keempat*, kontinuitas atau dilakukan secara terus menerus secara sistematis. (Tarrow, dalam jurnal Nakhoda Hasanuddin M. Saleh: 2007).

4. Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah Partai Golkar (DPD) yang beralamat di jalan Datuk Setia Maharaja Blok II No. 11 Pekanbaru. Sebagai partai yang besar dan sudah teruji dalam sistem politik Indonesia, maka seharusnya partai golkar mencerminkan partai yang mengedepankan perempuan, dan komunitas perempuan di partai golkar yang dekat dengan pusat pemerintahan, cukup banyak mendapat informasi politik tentunya lebih memungkinkan untuk mengikuti perkembangan, dan melakukan aktivitas /tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan pada umumnya, dan kepentingan perempuan di partai golkar khususnya.

a. Informan Penelitian

Peneliti akan menetapkan beberapa orang dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar sebagai informan kunci (*key informan*), yakni orang-orang yang mengetahui banyak atau memiliki informasi yang banyak tentang gerakan perempuan dalam partai golkar Kota Pekanbaru periode 2004 – 2009.

Adapun key informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Silvi Erawati : Kabag perempuan Partai Golkar Perempuan
- b. Masni Ernawati : Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG)
- c. Everos Zahidi : Kabag Kaderisasi & Keanggotaan Partai Golkar Pekanbaru
- d. Nurdiana : Wakil sekretaris Partai Golkar & Sekretaris KPPG Pekanbaru
- e. Sahril : Ketua Harian DPD Partai Golkar Pekanbaru

Key informan dalam penelitian ini bukan hanya perempuan yang memiliki posisi penting dalam Partai Golkar & yang mengetahui banyak tentang aktivitas perempuan dalam partai Golkar saja, tetapi peneliti juga menetapkan *key informan* laki-laki, dalam hal ini Bapak Sahril sebagai sumber informasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk membandingkan data atau informasi yang di dapat di lapangan, agar lebih tepat dan akurat (pembanding).

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam memperoleh data dan informasi penelitian tentang gerakan perempuan dalam partai golkar dengan dua (2) cara :

a. Wawancara :

Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada semua informan kunci secara mendalam mengenai gerakan perempuan dalam partai Golkar periode 2004 – 2009. Hasil dari tanya jawab kepada informan kunci inilah yang akan dianalisis dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini perlu dilakukan mengingat permasalahan yang diteliti berkaitan dengan peristiwa yang sudah berlalu, yakni gerakan perempuan dalam partai Golkar, yang dilakukan pada periode 2004 – 2009. Untuk itulah dengan data yang terdokumentasi di DPD Partai Golkar, informasi yang diperlukan bisa diperoleh, untuk melengkapi hasil wawancara dengan informan kunci.

B. Komposisi, Posisi dan Gerakan Perempuan Partai Golkar Periode 2004 – 2009 Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan

Sebagai sebuah bahan kajian yang penting untuk dianalisis maka ada baiknya untuk komposisi dan posisi perempuan partai golkar tidak hanya dilihat pada periode 2004 – 2009 saja, tetapi perlu dilihat pada periode sebelumnya (1999 – 2004) dan setelah periode 2004 – 2009, yakni periode 2010 – 2015. Artinya dengan melihat komposisi dan posisi pada masa 3 periode tersebut akan lebih memberikan data dan kajian yang lebih jelas.

1. Komposisi dan posisi perempuan dalam Partai Golkar Periode 1999 - 2004

Pada periode kepengurusan partai golkar periode 1999 – 2004 terdapat 75 orang jumlah pengurus. Dari 75 orang tersebut terdapat 11 perempuan (14,67 %) dan laki-laki 64 orang (85,33 %). Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan bahwa mayoritas kepengurusan partai golkar periode ini masih didominasi oleh laki-laki. Jika dihubungkan dengan ketentuan yang mendasari partai politik maka komposisi perempuan dalam kepengurusan partai golkar belum mencapai 30 %. Adapun nama-nama anggota perempuan yang duduk dalam kepengurusan partai golkar periode 1999 – 2004 dapat dilihat berikut ini :

1. Hj. Akmal DT Adham: Wakil ketua
2. Elly Novea Syafri, SH : Wakil Sekretaris
3. Yasmien Zen : Anggota Bagian OKK
4. Estika Dewi : Anggota Bag. Hub. Masyarakat & media massa
5. Maria : Anggota Bag. Hub. Masyarakat & media massa
6. Netty Suryati : Ketua Bagian Wanita & Kestra
7. Nurdiana, SP : Anggota Bagian Wanita & Kestra
8. Yenny : Anggota Bagian Wanita & Kestra
9. Yelvita : Anggota Bagian Wanita & Kestra
10. Rawiyah Nur : Anggota Bagian Kerohanian

Berdasarkan data tersebut di atas sekaligus menunjukkan posisi perempuan dalam partai Golkar, yakni dari 35 posisi (jabatan) yang terdapat dalam kepengurusan partai Golkar maka hanya terdapat 3 perempuan (8,57 %). Sementara sebahagian terbesar posisi kepengurusan partai ditempati oleh laki-laki, yakni 32 orang (91,43 %). Potret posisi kepengurusan partai Golkar tersebut tergambar sama dengan keberadaan perwakilan di DPRD Kota Pekanbaru, mengingat dari 10 kursi yang diperoleh partai Golkar ternyata semuanya diduduki oleh laki-laki (100 %), perempuan masih kosong / tidak ada (0 %)

2. Komposisi dan posisi perempuan dalam Partai Golkar periode 2004-2009

Jumlah keseluruhan pengurus partai Golkar periode 2004 – 2009 berjumlah 67 orang. Komposisi Perempuan dalam kepengurusan tersebut hanya 16 orang (23,88 %) dan laki-laki 51 orang (76,12 %). Jika dibandingkan dengan kepengurusan periode 1999 – 2004 maka komposisi jumlah pengurus perempuan dalam partai Golkar menunjukkan angka peningkatan sebesar 9,21 %, namun peningkatan tersebut masih belum mencapai quota 30 %. Untuk nama-nama pengurus perempuan yang terdapat pada kepengurusan partai Golkar periode 2004 – 2009, dapat dilihat berikut ini :

1. Masni Ernawati : Wakil Ketua
2. Nurdiana, SP : Wakil Sekretaris
3. Ir. Milli Maria : Wakil Bendahara
4. Nelly Ida Nuryati : Wakil Bendahara
5. Emilia Erman Junaidi : Anggota Bagian OKK
6. Ir. Yurika Listya Dewi,M,Sc : Anggota Bagian Pemenang Pemilu
7. Syafitri Golkaria : Anggota Bagian Pengab. Masyarakat
8. Nuraini, SH : Angt Bagian Perundang-undangan Hukum & HAM
9. Julaiha, SH : Anggt Bagian Perundang-undangan Hukum & HAM
10. Rika : Anggota Bagian Olahraga, Pemuda
11. Netty Suryati : Ketua Bagian Wanita dan Kestra
12. Yullaili : Anggota Bagian Wanita dan Kestra
13. Yanti : Anggota Bagian Wanita dan Kestra
14. Elnistimar : Anggota Bagian Wanita dan Kestra
15. Hj. Yasra : Anggota Bagian Kerohanian
16. Sari Arifin : Anggota Bagian Koperasi & Wiraswasta

Data di atas sekaligus menggambarkan posisi perempuan dalam kepengurusan partai Golkar yang berjumlah 5 perempuan (13,51 %) dari 37 posisi yang ada secara keseluruhan, laki-laki : 32 orang (86,49 %). Jika dibandingkan dengan posisi perempuan pada kepengurusan periode 1999 – 2004 lalu menunjukkan angka peningkatan 4,94 %. Untuk perwakilan di DPRD Kota Pekanbaru pada periode 2004 – 2009 menunjukkan perkembangan yang baik karena terdapat 2 anggota dewan perempuan (16,67 %) dari 12 kursi yang diperoleh Golkar, dan 10 kursi diduduki laki-laki (83,33 %). Anggota dewan perempuan tersebut adalah : Hj. Akmal Dt. Adham dan Diana Ariany Razak.

3. Komposisi dan posisi perempuan dalam Partai Golkar pada periode 2010 – 2015 :

Total kepengurusan partai Golkar berjumlah 215 orang, terdapat komposisi perempuan berjumlah 27 orang (12,56 %), dan laki-laki 188 orang (87,44 %). Persentase 12,56 % tersebut menunjukkan angka penurunan dibandingkan dengan kepengurusan periode 1999 – 2004 (11,32 %) maupun periode 2004 -2009 (2,11 %). Adapun nama-nama perempuan pengurus partai Golkar periode 2010 – 2015 adalah :

1. Diana Ariyani Razak : Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DapilIII (Bukit

Raya, Tenayan Raya, Marpoyan Damai)

2. Syafitri Syafei : Wakil Bidang Pengabdian Masyarakat
3. Masni Ernawati : Wakil Ketua Bidang Perempuan
4. Lely Ida Nuryati : Wakil Ketua Bidang Pariwisata & Seni Budaya
5. Arjunaida Hamid : Wakil Ketua Bidang Kerjasama Organisasi dan Kemasyarakatan
6. Sri Rosalina A : Wasekbid Pemenangan Pemilu Dapil II (Rumbai Pesisir, Rumbai)
7. Netty Suryati : Wasekbid Pemenangan Pemilu Dapil III
8. Safitri Golkaria : Wasekbid Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM
9. Nurdiana S,Pd : Wasekbid Pendidikan & Latihan
10. Roza Putri : Wasekbid Perempuan
11. Maryenik, SH : Wakil Bendahara Bidang Organisasi
12. Widyawati Azwir : Wakil Bendahara Bid Kaderisasi & Keanggotaan
13. Nuraini, SH : Wakil Bendahara Bid Hukum dan HAM
14. Rita Elona : Wakil Bendahara Bid Infokom
15. Amarisa Ayang : Anggota bagian organisasi
16. Betty Oktorisna : Anggota bagian kaderisasi & keanggotaan
17. Maria : Anggota bagian pengabdian masyarakat
18. Sri Hartati : Anggota bagian tani, nelayan & pedesaan
19. Asmayelly K.S,Pd: Ketua bagian pendidikan dan latihan
20. Megawati : Anggota bagian pendidikan dan latihan
21. Silvi Erawati : Ketua bagian perempuan
22. Emmi Elya : Anggota bagian perempuan
23. Embun Widosari : Anggota bagian perempuan
24. Yulmida : Anggota bagian perempuan
25. Dina Makmur : Anggota bagian Infokom
26. Yulaily Yunus : Ketua bagian pariwisata & seni budaya
27. Lily Azis : Anggota bagian kerjasama organisasi dan kemasyarakatan

Untuk posisi kepengurusan partai politik periode 2010 – 2015 berjumlah 69 posisi, dari keseluruhan posisi tersebut terdapat 17 posisi yang diduduki perempuan (21,64 %) dan laki-laki 52 posisi (75,36 %). Untuk posisi yang diduduki perempuan dibandingkan kepengurusan periode 2004 – 2009 ternyata menunjukkan angka peningkatan sebesar 8,13 %. Untuk keterwakilan di DPRD masih sama seperti periode 2004 – 2009, ada 2 anggota perempuan dari 9 kursi yang diperoleh Golkar. Yakni : Masni Ernawati dan Diana Ariany Razak. Jika dilihat dari persentase jumlah 2 anggota dewan menunjukkan angka peningkatan dari 16,67 % pada periode 2004 – 2009 meningkat menjadi 22,22 % pada periode 2010 – 2015. Hal ini disebabkan karena penurunan perolehan kursi partai Golkar dari 10 kursi pada tahun 2004 menjadi 9 kursi pada pemilu 2009.

4. Gerakan perempuan dalam Partai Golkar di Kota Pekanbaru periode 2004 – 2009

Pasca masa reformasi merupakan refleksi bagi kaum perempuan untuk melakukan suatu gerakan, tentang bagaimana berjuang untuk menyampaikan kepentingan kepada pemerintah, khususnya dalam partai Golkar, baik secara nasional maupun lokal. Berdasarkan aspek legalitas, eksistensi perempuan dalam partai politik (kepengurusan partai) sudah diperkuat/dengan Undang-undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan kuota 30% dalam kepengurusan partai politik, yang dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Iklim reformasi sudah memberi ruang bagi perempuan untuk ikut serta berpartisipasi politik dengan berbagai aktivitas, termasuk melakukan gerakan politik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Disamping iklim, legal formal dengan UU. No. 2 tahun 2008 juga sudah memperkuat aktivitas perempuan untuk bergabung dalam kepengurusan partai politik. Berdasarkan hal tersebut maka sekarang yang terpenting adalah bagaimana kaum perempuan sendiri mampu memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya, dengan cara mempersiapkan diri dengan kemampuan-kemampuan yang mendukung aktivitas perempuan dalam partai politik.

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik, khususnya dalam kepengurusan partai

sangat penting sebagai proses pembelajaran perempuan, yang selama ini dianggap tidak memiliki kemampuan, kurang percaya diri, lemah secara fisik dan lemah dalam loby meloby (*bargaining* politik), penakut, tidak memiliki pengalaman, langkah yang pendek, tuntutan keluarga (peran sebagai ibu), dominan perasaan, dan masih banyak alasan lainnya. Bergabung dalam partai politik akan memberikan pengalaman yang baik bagi perempuan dalam dunia yang selama ini menjadi dunianya kaum laki-laki, serta akan menepis pandangan masyarakat (aspek budaya) terhadap keberadaan perempuan.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas (aspek legal formal, partai politik dan kemampuan perempuan) maka tidak ada alasan bagi perempuan untuk tidak melakukan aktivitas politik, memperjuangkan kepentingan masyarakat (keluarga) pada umumnya dan kepentingan perempuan khususnya. Perjuangan yang dilakukan harus memiliki perencanaan, dan pertimbangan yang jelas serta terus menerus sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Secara teoritik menurut Tarrow (Hasanuddin Saleh :2007) gerakan politik harus dibangun atas dasar tatanan nilai yang kokoh supaya tidak terjebak hanya menjadi gerakan reaktif. Minimal gerakan perempuan harus didudukkan dalam kerangka gerakan reformatif. Untuk sampai ke pada tahapan tersebut, maka sebuah gerakan harus memiliki empat hal, yakni :

1. agenda yang jelas mengenai apa yang diinginkan perempuan untuk dirubah dalam tatanan kehidupan bernegara. Agenda atau paket politik yang ingin diperjuangkan dalam gerakan perempuan haruslah diturunkan dari tujuan yang telah dirumuskan secara matang.
2. Kolektivitas akan akan lebih bagus kalau terlembaga
3. Rasa solidaritas dan identitas kolektif.
4. Kontinuitas atau dilakukan secara terus menerus secara sistematis

1. Mempunyai agenda yang jelas mengenai apa yang diinginkan oleh perempuan dalam Partai Golkar.

Perempuan dalam partai golkar sudah memiliki agenda kerja yang ingin diwujudkan bagi kepentingan perempuan dan partai golkar, yang terdapat dalam program kerja organisasi sayap perempuan yakni : Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG). Agenda yang dimaksud adalah : meningkatkan jumlah perempuan dan upaya menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai golkar, upaya pemenangan perempuan dalam menghadapi pemilihan umum, dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak terkait isu-isu aktual yang mendasar Untuk memperjuangkan suatu kepentingan melalui suatu gerakan maka perempuan harus mempunyai terlebih dahulu memiliki agenda yang telah direncanakan atau disusun secara jelas. Berkaitan dengan hal tersebut maka perempuan dalam partai golkar telah menyusun beberapa program kerja bidang perempuan pada periode 2004 – 2009, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut bidang kesejahteraan dan peningkatan kapasitas perempuan melalui program rencana kerja yang berbasis sosial budaya dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan orientasi dan konsolidasi organisasi, penguatan kelembagaan (peningkatan kapasitas) perempuan di tingkat kota, kecamatan, kelurahan untuk kemenangan partai golkar.
- b. Meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya perempuan, pengkaderan, pendidikan, pemberdayaan, dan pengembangan kader perempuan di tingkat kota, kecamatan, kelurahan yang dilaksanakan oleh organisasi yang mendirikan organisasi sayap partai golkar untuk upaya kemenangan partai golkar.
- c. Menyusun dan mengembangkan berbagai kebijakan, program, kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kota, kecamatan, kelurahan untuk kemenangan partai golkar.

Melalui ketiga program kerja tersebut di atas maka terdapat beberapa agenda yang ingin diperjuangkan oleh perempuan partai golkar, yang meliputi :

- a. *Meningkatkan jumlah perempuan dan upaya menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai golkar.*

Undang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik secara tegas telah menentukan posisi perempuan atau porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik baik pada level pusat maupun daerah. Keterlibatan perempuan dengan quota 30 % tersebut harus dinyatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik (AD / ART). Ketentuan ini merupakan kesempatan yang baik bagi perempuan bukan hanya untuk berkiprah dalam panggung politik saja tetapi dapat mendorong partai politik menciptakan kader pemimpin perempuan.

Dalam partai golkar kiprah perempuan terhimpun secara khusus dalam organisasi yang dinamakan Kesatuan Perempuan Partai Golkar. KPPG dalam melaksanakan aktivitasnya melakukan pemberdayaan perempuan di segala bidang kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut maka prioritas yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kedudukan dan partisipasi kader perempuan partai golkar pada posisi strategis di partai maupun di lembaga-lembaga politik lainnya.

Tugas Kesatuan Perempuan Partai Golkar meliputi 4 hal, yakni :

1. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan partai golkar
2. melakukan kegiatan dalam rangka rekrutmen, pengkaderan, penggalangan dan pengembangan massa partai golkar sesuai bidang dan kelompok strategisnya
3. mempersiapkan kader-kader perempuan partai golkar dalam rangka regenerasi kepemimpinan partai golkar
4. mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi sejenis beserta kegiatannya yang terkait dengan bidang dan kelompok strategisnya.

Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai golkar akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpolitik, mempengaruhi dan menciptakan perubahan-perubahan dengan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi atau kepentingan perempuan (keluarga). Hal tersebut akan mudah dicapai apabila partai golkar memberikan ruang bagi perempuan. Karena partai golkar sebagai sebuah partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam perluasan partisipasi politik (perempuan).

Peningkatan jumlah perempuan yang signifikan dalam partai golkar dapat lebih menjamin terakomodirnya kepentingan perempuan dalam setiap kebijakan yang diprioritaskan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam kepengurusan partai golkar tersebut dilakukan aktivitas-aktivitas oleh perempuan partai golkar bersama organisasi sayap perempuannya melalui pendekatan kepada masyarakat untuk menarik simpati/perhatian masyarakat. Pergerakan perempuan yang dilakukan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah perempuan dalam kepengurusan partai golkar saja, melainkan juga bagaimana perempuan bisa mendukung posisi strategis sehingga bisa lebih mempengaruhi proses kebijakan dan pengambilan keputusan, yang mana lebih diprioritaskan kepada hak-hak perempuan yang termarginalkan. Untuk itu dilakukan aktivitas-aktivitas oleh perempuan partai golkar, yang terdiri dari :

- Kegiatan bakti sosial dan ikut membaaur diri dalam kegiatan warga masyarakat

Pelaksanaan bakti sosial ini merupakan suatu strategi pendekatan untuk menarik simpati masyarakat yang kuat dan mandiri sehingga mencapai perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi yang semula tidak menguntungkan masyarakat, berubah menjadi kondisi yang menguntungkan dan berpihak kepada masyarakat tersebut. Bakti sosial ini merupakan salah satu aktivitas yang bisa menarik masyarakat khususnya perempuan untuk mau ikut menjadi anggota partai. Disamping itu, diperlukan teknik mengenal dan dikenal yang dilakukan dengan cara membaaurkan diri untuk ikut arisan, wirid pengajian, majelis taklim, ikut berkumpul jika ada acara lain (pameran/bazar). Dengan sering ikut mengisi acara-acara yang diadakan oleh masyarakat maka perempuan dalam partai golkar dapat membaaur dengan masyarakat

- Seminar pendidikan politik dan studi banding.

Kegiatan seminar pendidikan politik dan studi banding merupakan pendidikan politik bagi perempuan, merupakan sarana bagi proses pembelajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, dengan demikian perempuan mengetahui arti pentingnya partisipasi politik.

b. Upaya pemenangan perempuan dalam menghadapi pemilihan umum

Kesatuan Perempuan Partai Golkar merupakan organisasi sayap perempuan, yang pembentukannya merupakan salah satu strategi untuk menghimpun kekuatan politik perempuan dalam menghadapi pemilu 2004. Mengingat isue menyongsong pemilu 2004 sangat kuat untuk keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dengan quota 30 %. Undang Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum pasal 65 ayat 1 telah memberi ruang bagi perempuan untuk memasuki wilayah publik (politik) dengan quota 30 % tersebut.

Dengan demikian KPPG dibentuk untuk menghimpun basis kekuatan massa Golkar di bidang perempuan. Dimana KPPG dalam melaksanakan aktivitasnya melakukan pemberdayaan perempuan di segala bidang kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut maka prioritas yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kedudukan dan partisipasi kader perempuan partai Golkar pada posisi strategis di partai maupun di lembaga-lembaga politik lainnya.

Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai Golkar akan memberikan kesempatan bagi perempuan sendiri untuk berpartisipasi secara langsung dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan (keluarga). Partai Golkar dapat membantu agar perempuan dapat dicalonkan untuk masuk dalam lembaga-lembaga politik formal, sehingga perempuan dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan perempuan.

Upaya pemenangan perempuan dalam partai Golkar merupakan pergerakan perempuan yang dilakukan untuk dapat mengantarkan kader perempuan partai Golkar agar menjadi politikus yang kuat dan mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat sekaligus membangun iklim politik yang lebih diwarnai nilai-nilai feminisme, kesantunan, anti kekerasan. Adapun aktivitas yang dilakukan meliputi :

- Melaksanakan Diklat orientasi pengkaderan

Diklat orientasi pengkaderan partai Golkar merupakan proses pengkaderan yang dilakukan terhadap calon kader. Diklat ini memberikan pendidikan politik bagi perempuan partai Golkar, sebagai wadah membina anggota perempuan agar memiliki komitmen terhadap ideologi, cita-cita perjuangan, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan partai Golkar, memiliki ilmu pengetahuan, dan kemampuan teknis pengembangan organisasi, kepemimpinan, kemandirian, dan popularitas.

Pendidikan politik kader bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimpinan partai, yang lebih berorientasi pada pemantapan dan pengembangan program partai, dan lebih bersifat memelihara mekanisme demokrasi yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenjang, yakni :

- a) Jenjang pertama (bagi kader pemula), pendidikan diarahkan untuk : 1). pemahaman arti berorganisasi, 2). menanamkan loyalitas terhadap organisasi, 3). memantapkan dedikasi.
- b) Jenjang kedua (bagi kader madya), pendidikan diarahkan untuk : 1). membuka wawasan berfikir yang berdasarkan ideologi partai, 2). menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi, 3). meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi
- c) Jenjang ketiga (bagi calon politisi), pendidikan diarahkan untuk : 1). membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual, 2). membidik cara berfikir sistematis dan strategis, 3). membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa politik dan cara mengantisipasinya, 4). membidik berfikir futuristik

Pengkaderan dalam partai Golkar memiliki persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap kader, yakni : kecakapan, keuletan, prakarsa, militansi, disiplin, kompetensi (ideologi, politik, kegolkaran, kepemimpinan, keprofesionalan). Adapun ciri-ciri kader perempuan yang direkrut adalah kader yang : loyal terhadap partai, mandiri, siap maju untuk lebih baik, siap melakukan kerja untuk rakyat bukan pribadi, siap berjuang untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Selanjutnya kriteria kader yang direkrut oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar adalah : 1). Paham tentang lingkungan Golkar, 2). punya potensi dan mau bergabung untuk memajukan partai, 3). keluarganya memiliki hubungan dengan partai, 4). mau berpolitik.

- Training of Trainer (ToT) Partai Golkar

Training ini termasuk kegiatan pelatihan pengkaderan tentang strategi perempuan untuk tampil dalam pemilihan umum dengan melihat perjuangan perempuan di beberapa negara untuk berhasil duduk di legislatif, dengan dukungan tiga kemampuan, yakni : kemampuan, kemauan, dan kesempatan.

- **Diklat Juru Kampanye**

Program penyiapan juru kampanye dalam menghadapi pemilu bertujuan untuk menyatukan persepsi tentang wacana kebangsaan dan arah kebijakan partai yang harus diperjuangkan dan dikomunikasikan oleh perempuan partai Golkar kepada masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif akan misi khusus yang diemban perempuan partai Golkar. Diklat juga membekali kader perempuan partai Golkar kemampuan teknis komunikasi massa dan hal-hal penting lainnya, sehingga melahirkan kader perempuan yang berkualitas. Diklat juru kampanye dilaksanakan oleh bagian pemenangan pemilu, bagian ini yang berhak menentukan sikap, trik/kiat apa yang harus dibuat untuk membantu seseorang duduk menjadi anggota dewan, dan memiliki pengaruh yang sangat besar karena tugasnya mengawal sampai pada teknis tempat pemungutan suara (agar tidak terjadi penyusutan jumlah suara).

Ada tiga faktor yang menyebabkan seorang perempuan terpilih menjadi juru kampanye dalam partai Golkar, yakni : 1). Pintar berbicara/retorika, 2). Paham/menguasai apa yang dibicarakan (tentang partai Golkar), 3). Dorongan partai dan aspek materi.

c. ***Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak terkait isu-isu aktual yang mendasar***

Partai politik mempunyai peranan yang penting bagi peningkatan partisipasi politik perempuan. Untuk itu partai Golkar dapat membantu dan mendorong perempuan mencapai tuntutan/kepentingan perempuan untuk memenuhi dan memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan perempuan (keluarga), terutama berkaitan dengan kualitas hidup perempuan (kemiskinan, pendidikan yang rendah), dan isu-isu aktual yang mendasar, diantaranya : kekerasan dalam rumah tangga, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, masalah gizi.

Banyak kritikan yang dilontarkan kepada gerakan perempuan yang selama ini melakukan perjuangan yang sifatnya sporadik dan parsial, masing-masing organisasi/kekuatan melakukan gerakan sendiri-sendiri untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, ditambah lagi dengan rendahnya keterwakilan perempuan.

Sebagai bagian dari pergerakan perempuan maka Kesatuan Perempuan Partai Golkar melakukan beberapa aktivitas jangka pendek, yang meliputi : a). Santunan (kelaparan, sakit, musibah,dll). b). Stimulasi, untuk masalah-masalah yang dapat dilakukan sendiri oleh perempuan namun membutuhkan pancingan/intervensi dari luar, c). Transformasi, perubahan pola pikir, sikap hidup, dan budaya. Aktivitas yang dilakukan perempuan partai Golkar, meliputi : 1). bidang kesehatan : peningkatan pelayanan kesehatan, 2). Mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan, baik dalam rumah tangga serta bidang ketenagakerjaan.

Program perempuan partai Golkar yang berkaitan dengan masalah di bidang ketenagakerjaan, meliputi : 1). Kegiatan konsultasi dan pendidikan bagi calon tenaga kerja perempuan (dalam dan luar negeri) dari segi keterampilan, hukum dll, 2). Kegiatan peningkatan kemampuan dan wawasan perempuan yang berspektif gender dan anti kekerasan, 3). Kegiatan konsultasi, 4). Memfasilitasi forum-forum lokal, nasional dan regional berkaitan dengan masalah gender dan tenaga kerja perempuan, 5). Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui media cetak dan elektronik, 6). membentuk lembaga pelayanan

2. **Kollektivitas Perempuan Yang Terlembaga dalam Partai Golkar**

Untuk berhasil memperjuangkan agenda-agenda dalam pergerakan politik, perempuan harus berada dalam pengelompokan yang terlembaga, dengan dilengkapi oleh potensi dan dukungan net working (jaringan)penghubung) yang memainkan peranan penting. Perempuan partai Golkar menyadari bahwa tuntutan perbaikan dan pembaharuan sistem nasional yang mengharuskan adanya upaya seluruh komponen bangsa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka keberadaan Kesatuan Perempuan Partai Golkar merupakan lembaga yang

dibentuk untuk memainkan peranan tersebut. Semenjak terbentuknya organisasi ini tahun 2002 jumlah perempuan dalam kepengurusan semakin meningkat, dengan demikian perempuan dalam partai golkar dapat memperjuangkan agenda-agenda dalam pergerakan melalui organisasi sayap yang sudah terlembaga. KPPG merupakan basis yang menghimpun kekuatan massa partai golkar di bidang perempuan, dalam aktivitasnya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Prioritas aktivitas pada peningkatan kedudukan dan partisipasi kader perempuan partai golkar pada posisi strategis di partai maupun di lembaga-lembaga politik lain.

Untuk memperkuat jaringan pergerakan perempuan dalam partai golkar (KPPG) dilakukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang memiliki isu pemberdayaan perempuan, seperti : Kaukus perempuan. Kerjasama yang terjalin dalam bentuk kegiatan pelatihan-pelatihan dan diskusi-diskusi politik/seminar (Perempuan Kader Organisasi Sosial Politik: 2007).

Dalam kegiatan kesetaraan gender maka Kesatuan Perempuan Partai Golkar bekerjasama dengan Pusat Data Tentang Informasi Perempuan Riau (PUSDATIN PUANRI) yang membuat data (terpilah) tentang perempuan Riau. Kegiatan Pusdatin Puanri adalah memilah data tentang perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mengetahui jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota legislatif dan informasi tentang perempuan yang lainnya.

3. Rasa Solidaritas dan identitas kolektivitas yang dimiliki oleh perempuan dalam Partai Golkar

Rasa solidaritas antara sesama perempuan dan rasa empati terhadap perempuan yang berada pada posisi kelas dua merupakan bangunan dasar yang mengukuhkan pergerakan perempuan dalam partai golkar. Rasa solidaritas dan identitas kolektif tidak dapat tumbuh tanpa adanya upaya keras untuk menanamkan dan memperjuangkannya. Hal tersebut harus dimulai dari keseriusan untuk membentuk dan membesarkan organisasi, yang selanjutnya diharapkan tumbuh berkembang jaringan-jaringan yang semakin mengukuhkan rasa solidaritas dan identitas kolektif. Rasa solidaritas yang terbentuk yakni rasa keadilan dan kesetaraan gender yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan, menumbuhkan kembangkan kemajuan perempuan, serta mengangkat potensi yang ada pada perempuan.

Rasa solidaritas dan identitas kolektif yang terbentuk dalam agenda yang diperjuangkan oleh perempuan partai golkar meliputi :

- Peningkatan jumlah perempuan dan upaya menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai golkar. Aktivitas yang dilakukan melalui pendekatan pembauran dengan masyarakat dalam kegiatan seminar pendidikan politik. Melalui pendekatan tersebut diharapkan terbangun kebersamaan yang pada akhirnya membuat kaum perempuan tertarik atau berminat untuk bergabung dalam partai golkar.
- Upaya kemenangan dalam menghadapi pemilihan umum. Aktivitas yang dilakukan melalui orientasi pengkaderan, pelatihan dan diklat juru kampanye.
- Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak terkait isu-isu aktual. Aktivitas ditekankan pada bidang kesehatan dan perlindungan perempuan terhadap KDRT, serta membentuk lembaga perlindungan anak.

4. Kontinuitas Agenda yang dilakukan secara sistematis oleh perempuan dalam Partai Golkar

Agenda yang diperjuangkan dalam pergerakan perempuan partai golkar adalah untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam partai golkar, perempuan menempati posisi strategis, dan upaya kemenangan dalam menghadapi pemilihan umum, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan yang terpinggirkan/terabaikan. Setiap agenda yang diperjuangkan tersebut dilakukan secara kontinuitas karena proses yang berlangsung pada pergerakan perempuan partai golkar adalah agenda yang berjangka panjang, sehingga membutuhkan ketekunan, dan lobi-lobi politik serta keseriusan menegosiasikan agenda-agenda tersebut. Disamping kecerdikan membangun image dan kenyataan partai golkar sebagai sebuah partai politik yang memiliki kekuatan dan jaringan yang

luas. Kontinuitas agenda dari pergerakan perempuan partai golkar, meliputi :

- Peningkatan jumlah perempuan partai golkar dan upaya menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai golkar : upaya yang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan kaukus perempuan politik Indonesia Propinsi Riau melalui kegiatan seminar, dan studi banding serta menghadiri seminar tentang pemberdayaan perempuan seperti di Kota Malang (24 Mei 2008) yang diikuti oleh empat perempuan pengurus partai golkar.
- Pemenangan pemilu : melalui kegiatan orientasi pengkaderan, pelatihan dan pendidikan politik, yang dilakukan secara kontinuitas, begitu juga dengan diklat juru kampanye.
- Peningkatan kualitas hidup perempuan; yang meliputi bidang kesehatan dan kekerasan terhadap perempuan (baik dalam rumah tangga maupun di tempat kerja).

D. Simpulan :

1. Komposisi jumlah perempuan dalam kepengurusan partai golkar selama tiga periode (1999 – 2004, 2004 – 2009 dan 2010 – 2015) mengalami fluktuasi, periode 2004 – 2009 mengalami peningkatan (23,88 %) dan periode 2010 – 2015 mengalami penurunan (12,56 5).
2. Posisi yang ditempati perempuan dalam kepengurusan partai golkar selama tiga periode tersebut mengalami peningkatan.
3. Gerakan perempuan partai golkar periode 2004 – 2009 dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dilakukan melalui Kesatuan Perempuan Partai Golkar, terdapat dalam program yang tersusun, yakni :
 - a) agenda yang jelas mengenai apa yang ingin diperjuangkan oleh gerakan perempuan, yang meliputi : peningkatan jumlah perempuan dan upaya menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai, upaya kemenangan pemilu dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak terkait dengan isu-isu yang mendasar.
 - b) kolektifitas perempuan yang terlembaga dalam partai golkar, melalui pembentukan organisasi sayap perempuan (KPPG) sebagai bagian dalam struktur organisasi yang secara vertikal dalam mengkaderisasi anggota perempuan, sehingga dapat memperjuangkan agenda dalam pergerakan politik perempuan secara melembaga.
 - c) Rasa solidaritas dan identitas kolektifitas yang dimiliki oleh perempuan dalam partai golkar, yang terbentuk melalui keadilan dan kesetaraan gender sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan mengangkat potensi kader perempuan.
 - d) Kontinuitas agenda yang dilakukan secara sistematis oleh perempuan dalam partai golkar, yakni perjuangan perempuan partai golkar sebagai proses yang berlangsung secara terus menerus, yang merupakan jangka panjang, membutuhkan ketekunan melalui lobi-lobi politik dan keseriusan menegosiasi agenda/kepentingan, membangun *image* yang baik, serta perluasan jaringan.

Daftar Pustaka

Anugrah, Astrid, (2009). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Jakarta, Pancuran Alam

Budiardjo, Miriam. (2004). Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Umum.

Gafar, Affan, (2000). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.

Hadiz, Liza. (2004). *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

Meleong, Lexi J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulia, Siti Musdah. (2008). *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*. Yogyakarta: Kibar Press.

----- dan Anik Farida. (2005). *Perempuan dan Politik*. Jakarta. PT. Gramedia

Siregar, Alimin. (2007). *Membangun Citra Positif Kaum Perempuan Terhadap Politik*. Pekanbaru. Unri Press

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana

Soetjipto, Ani Widayani. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Kompas

Sumber-sumber Lain :

Saleh, Hasanuddin, M. (2007). *Gerakan Politik Perempuan Di Indonesia*. Jurnal Nakhoda

Seda, Francisia. (2002). *Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Jumlah Semata. International Idea*

Wan Asrida (2005). *Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Daerah Kota Pekanbaru periode 2004 – 2009*. Jurnal Demokrasi

Undang - Undang Dasar 1945

Undang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum